

BERBAGAI PERMASALAHAN PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI ILMU SOSIAL DAN HUKUM

Muhammad Makhfudz SH MH

Dosen Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

I. PENDAHULUAN

Di masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masyarakat religious yang tertanam dalam adat istiadat mulai dari nenek moyang bangsa Indonesia yang dikenal mulai dari animisme sampai datangnya sejarah para wali sebagai tanda datangnya ajaran/agama islam,sampai masa kejayaan yang ditandai dengan sejarah kerajaan-kerajaan islam.

Dalam islam pernikahan merupakan suatu aqad (perjanjian) yang diberkahi antara seseorang laki-laki dan seorang wanita, yang dengannya dikhalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan.Dengan pernikahan itu keduanya mulai mengarungi bahtera kehidupan yang panjang, yang diwarnai dengan rasa cinta dan kasih, saling tolong menolong, saling pengertian dan penuh toleransi, masing-masing saling memberikan ketenangan,ketenteraman dan kenikmatan hidup.Al-Qur'an telah melukiskan hubungan syar'i antara seorang laki-laki dan seorang wanita ini dengan gambaran yang penuh kelembutan, didalamnya tersebar nilai-nilai cinta, keharmonisan, kepercayaan, saling pengertian dan kasih sayang.Sebagaimana tersebut dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya itu adalah Dia telah menciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri,supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya,dan dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Masyarakat Indonesia sebagian besar telah tertanam sebuah keyakinan sesuai dengan firman

Tuhan yang menjadi keyakinannya bahwa perkawinan sebagai suatu perjanjian suci dan kemudian direduksi sebagai ketentuan yang dituangkan melalui aturan atau norma/kaidah hukum yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuannya menentukan bahwa “Perkawinan sah bila perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agamanya.”

A. Latar belakang permasalahan.

Dalam perjalanan sejarah pelaksanaan perkawinan sangat erat hubungannya dengan adat istiadat yang berlaku dimasing-masing lingkungan, dari hasil pengamatan penulis didapatkan ada berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan, dapat disebut antara lain; 1) adanya saling suka dan saling menanggapi, 2) untuk melindungi kehormatan seseorang, 3) waktu dan uang, 4) adanya keterlibatan emosional, 5) adanya rasa aman. Faktor ini merupakan faktor yang bersifat umum terjadi di hampir setiap daerah, dari beberapa faktor tadi dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang terbagi dalam sistem unilateral karena unsur/faktor Endogami (in marriage) dipengaruhi oleh faktor-faktor ; a) dapat menjaga kemurnian norma/nilai yang berlaku dalam kekerabatan secara turun menurun (biasanya berlaku di lingkungan masyarakat Yogyakarta yang mengaku masih keturunan raja yang memegang teguh falsafah Jawa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; bebet, bibit, bobot), b) waktu yang tepat untuk perkawinan (di Jawa masih mengenal perhitungan hari (weton) ada istilah hari yang menguntungkan dan hari sial). Sistem yang lain disebutnya bilateral, perkawinan dilaksanakan karena faktor/unsur exogami (inter marriage) perkawinan dapat dilakukan ; a) bebas memilih diluar kerabatnya, b) waktu yang tepat untuk perkawinan hanya dibatasi umur/usia saja.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa terjadinya perkawinan dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda di tiap-tiap daerah sesuai dengan adat istiadat di masing-masing daerah; misal di daerah Yogyakarta yang berlaku di lingkungan kerajaan perkawinan dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga jadi bila terjadi perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak sederajat walaupun baru pertama kali wanita yang kemudian menjadi isteri disebutnya selir. Sedang yang terjadi di daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan sistem kekerabatannya yang bersifat matriarchat, pelaksanaan perkawinan dilaksanakan untuk menjaga kemurnian sistem kekerabatan tersebut. Dalam sejarah telah dipopulerkan melalui cerita roman yang berjudul Salah Asuhan yang menceritakan kisah cinta antara Siti Nurbaya yang dijodohkan secara paksa oleh orang tuanya.

Kemudian setelah itu pelaksanaan perkawinan mengalami perubahan seiring dengan berubahnya jaman ke arah modernitas, sebagaimana disebutkan dalam teori stimulus-value-role ; perkawinan terjadi karena situasi yang bebas memilih, yang biasanya melewati tiga tahap ; 1) tahap rangsangan (stimulus) ketertarikan fisik 2) tahap perbandingan nilai (value) banyak kesamaan atau sebaliknya dan 3) tahap definisi peran (role) bisa saling melengkapi peran masing-masing atau tidak. Namun tidak berarti bebas sebebaskan-bebasnya, tapi tetap ada pakem yang hampir dipahami oleh setiap individu bangsa Indonesia. Pakem tersebut adalah pengaruh ideologi/agama, jadi adat istiadat di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan agama.

B. Permasalahan.

Sudah menjadi pendapat umum, bila dua orang manusia yang berlainan jenis (seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang dilandasi rasa kasih sayang, kepercayaan dan ingin untuk hidup bersama yang harmonis. Dalam hal ini tentu tidaklah harus diartikan hanya untuk bersetubuh antara dua orang manusia tadi. Namun demikian bersetubuh dalam hal itu merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama, baik yang tujuannya untuk mendapatkan anak

keturunan sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka.

Pengecualian dari tujuan ini, hidup bersama bagi dua insan yang berbeda jenis bisa terjadi tanpa bersetubuh. Dengan kata lain faktor bersetubuh tidaklah merupakan suatu syarat mutlak untuk hidup bersama. Ini terbukti dari realitanya suatu perkawinan antara dua orang yang sudah lanjut usia diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Begitu juga tidaklah dibenarkan bila pasangan suami isteri tidak mungkin mempunyai anak keturunan merupakan sebab resmi untuk bercerai. Bahkan belakangan ini, ketertarikan dua insan yang sama untuk melakukan hubungan seks, juga bisa melangsungkan hidup bersama. Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, adanya permasalahan yang dalam perjalanan sejarah seiring dengan berubahnya waktu dan tuntutan antara lain;

“Bagaimana bila terjadi adanya tuntutan dari sekelompok kecil yang terjadi dalam masyarakat adanya perkawinan antara makhluk Tuhan yang satu jenis ?”

II PEMBAHASAN

A Tinjauan menurut ilmu-ilmu Sosial

Sebagaimana kita sadari bahwa kehidupan dalam suatu masyarakat selalu berupa sebuah kelompok yang diartikan sebagai keadaan bersama yang relatif mantap dan ditandai oleh suatu suasana masuk golongan bersama. Dengan demikian setiap individu yang masuk sebagai anggota suatu kelompok sosial tidak mesti harus melepaskan sifat-sifat sebagai seorang individu yang mempunyai pribadi dan mempunyai perasaan, kemauan dan pikirannya sendiri, tetapi hanyalah bahwa pribadinya sebagai kesatuan yang bertindak dan berintegrasi berhadapan dengan suatu kesatuan berintegrasi dengan yang lainnya, yang membentuk, mengacu tingkahlakunya. (S. Takdir Alisyahbana, Antropologi Baru, 1986, 106)

Disamping itu disetiap kehidupan sosial pasti ada nilai-nilai yang ikut mewarnai hidup dan kehidupannya. Dari sini mungkin timbul pertanyaan apa pengertian nilai menurut S. Takdir Alisyahbana; nilai-nilai adalah tenaga pendorong dan penentu tujuan dalam tingkah laku sosial seperti juga dalam tingkah laku pribadi/individu. (S. Takdir Alisyahbana, 1986, 110). Nilai tersebut menjadi pendorong bagi individu/pribadi yang hidup dalam kelompok sosial, sedang nilai-nilai sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial. Sedang yang dimaksud dengan nilai-nilai sosial menurut Muzafer Sherif nilai sosial memberikan pada individu sekumpulan ketentuan-ketentuan yang mengandung perasaan. Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksud sebagai sikap sosial. Sikap-sikap sosial, apabila telah terbentuk dalam individu, menjadi pedoman dalam setiap keadaan, menentukan sebagian yang terpenting dari pilihan atau kesukaan dan ketidaksukaan individu. (Muzafer Sherif, *The Psychology of Social Norms*, 1936, 117). Sehingga didalam masyarakat terdapat berbagai hal yang mempengaruhi hidup dan kehidupan dalam masyarakat yang bisa berkedudukan sebagai norma sosial. Nilai-nilai sosial tersebut dalam perkembangannya kemudian membentuk/menjelma menjadi adat-istiadat. S. Takdir Alisyahbana adat-istiadat adalah sekumpulan aturan yang mengatur tingkah-laku individu dalam masyarakat dari lahir sampai mati.

Dalam sistem adat-istiadat inilah manusia hidup turun-temurun. Dan setiap masyarakat pasti terdapat bermacam-macam tipologi adat-istiadat yang mengatur berbagai segi dari tingkahlaku sosial. Nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial dalam masyarakat Indonesia selalu terkandung didalamnya nilai-nilai, memang menurut sejarah masyarakat kita sebelum islam masuk masyarakat sudah mengenal Tuhan melalui Animisme. Dengan demikian sangat wajar dalam setiap kehidupan tidak bisa dipisahkan dengan agama atau kepercayaan akan adanya Tuhan.

Sampai-sampai dalam norma formalpun selalu mengedepankan Hukum agama, sebagaimana tersebut dalam ketentuan undang-undang perkawinan. W.G. Sumner membagi adat-istiadat dalam dua kategori yang sering dipakai dalam sosiologi Amerika, yaitu *folkways and mores*. Folkways adalah aktifitas sehari-hari dalam hidup seperti memberi hormat, gaya pakaian, pilihan makanan dan penentuan waktu makan dan sebagainya. Pada umumnya tidak ada yang mengetahui kapan lahirnya, tapi selalu hadir dalam tiap harinya yang menjadikan hidup menjadi teratur dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari antara folkways dan mores tidak bisa dipisahkan, karena adat istiadat tidak bisa dipisahkan dengan kepercayaan atau agama. Hal ini disebabkan karena konsep berfikirnya/falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersifat tosentris yang artinya; segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian bangsa Indonesia dalam setiap aktifitasnya dalam kesehariannya harus mendapat ridho (izin) dari Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda sekali dengan bangsa barat/asing yang memiliki falsafah yang bersifat antroposentris yang artinya; segala sesuatu berpusat pada manusia (dengan demikian manusia memegang peran penting). Dengan demikian dalam memutuskan sesuatu hal walaupun berhadapan didalamnya ada unsur folkways maupun mores hanya berdasarkan kompromi saja menurut pertimbangan manusia. Hal ini sangat wajar karena diluar negeri (diluar dunia islam) bila dilihat dari segi ideologi politis berideologi yang disebut sekuler (paham yang berpendapat urusan negara dipisahkan dengan urusan agama).

Dengan demikian bila dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis, bila melihat realita kejadian kesehariannya maka tuntutan dari sekelompok kecil masyarakat yang disebut kelompok gay tidak mungkin terjadi. Seperti kita lihat kelompok gay baru memulai kegiatan kumpul-kumpul untuk melakukan seminar atau kongres sudah mendapat pertentangan, pasti mendapatkan penolakan. Karena ideologi bangsa Indonesia yang bersifat tosentris yaitu antara folkways dan mores tidak bisa dipisahkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tuntutan perkawinan sejenis tidak mungkin terjadi di wilayah Republik Indonesia tercinta, karena memang nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat Indonesia tidak menghendakinya. Namun sangat disayangkan sistem hukum kita yang tidak jelas mengapa warga negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan di wilayah negara lain memakai hukum negara tersebut, dan kemudian diakui juga statusnya di negara kita kemudian kembali ke negara asal yaitu Indonesia. Bukannya dalam memberlakukan Hukum Nasional kita berdasar teori teritori yang artinya memberlakukan hukum berdasar domisili wilayah (teritori) dan berdasar pada personality artinya berlaku bagi warga Indonesia dimanapun berada.

Hidup bersama ini berakibat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena kebersamaan mereka disebut “keluarga” dengan segala akibat hukumnya. Berhubung dengan adanya akibat penting inilah diperlukan adanya suatu peraturan berupa syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya untuk hidup bersama itu. Peraturan yang dimaksud inilah yang menimbulkan pengertian “**Perkawinan**”, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 7).

DITINJAU DARI ILMU HUKUM

Ketentuan perkawinan ditentukan oleh berbagai norma yang berlaku. Di Indonesia ketentuan norma privat (termasuk perkawinan) bersifat pluralistik. Komponen pluralnya disebabkan oleh

berbagai faktor. Faktor norma Negara (kini sudah tidak berlaku lagi) ada perkawinan menurut Hukum Negara (Burgerlijk Wetboek dan Undang-undang Perkawinan) dan menurut hukum adat. Faktor norma agama menimbulkan perkawinan menurut agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. **Beberapa problem mulai muncul setelah dideklarasikan di era Globalisasi, dimana kejadian di dunia luar segera diketahui oleh masyarakat kita di Indonesia.** Dan tidak sedikit juga membawa pengaruh dan tekanan yang bersifat memaksa, sebagaimana terjadi di Surabaya telah teretus sebuah rencana kongres Gay yang isinya dapat ditebak adalah sebuah tuntutan persamaan haknya.

Perbedaan norma perkawinan itu dapat menimbulkan perkawinan campuran Sisi lain, hubungan seksual dengan sesama jenis (sesama homo dan sesama lesbian) juga bisa membentuk keluarga dengan perkawinan. Dari kacamata HAM kejadian yang demikian ada yang menilai sebagai sesuatu yang harus diberi tempat sama dengan manusia lain. Tuntutan kesamaan itu hingga kini menimbulkan pro dan kontra. Bagaimanakah Perkawinan campuran dan sesama jenis dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia? Dengan memahami uraian perkawinan dalam berbagai perspektif hukum perkawinan di Indonesia di bawah ini, pembaca budiman telah memahami dengan sendirinya jawaban atas pertanyaan di muka. Namun demikian penulis juga menekankan kembali analisisnya pada bagian-bagian tertentu.

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang akan disebut juga UUP, menjelaskan bahwa :*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Prinsip-prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan tersebut antara lain:

- Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal;
- Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu;
- Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan;
- Calon suami isteri harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan;
- Batas usia kawin bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun;
- Perceraian dipersulit dan dilakukan disidang pengadilan;
- Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

Jika dibandingkan dengan Pasal 26 KUHPerd (yang berlaku hingga tahun 1974), perkawinan, tidak dijelaskan dengan definisi, hanya menyebut bahwa “ undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata”. Menurut Scholten (dalam Soetojo Prawirohamijoyo, 1986:13), “perkawinan dikatakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara”.

Kedua definisi perkawinan tersebut di atas, sama-sama menekankan adanya hubungan antara ikatan seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini berarti bahwa

perkawinan itu adalah perikatan (verbentennis). Perikatan disini tidaklah sama dengan perikatan (janji) yang lahir dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerd, yaitu pada pokoknya penuh dengan kebebasan untuk menentukan sendiri isi dari janji tersebut dengan sesuka hatinya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebaliknya perjanjian yang dimaksudkan dalam perkawinan, sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari janji suami isteri itu. Kalau seorang pria dan seorang wanita berkata sepakat untuk melaksanakan perkawinan, ini berarti mereka saling berjanji menaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban suami isteri selama dan sesudah hidup bersama serta mengenai kedudukannya dalam masyarakat terhadap anak mereka. Begitu juga dalam hal menghentikan perkawinan, suami isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk bercerai melainkan terikat pada peraturan-peraturan untuk itu.

2. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, masalah perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata” (hak dan kewajiban suami isteri, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak), tetapi juga merupakan perikatan adat (hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, upacara-upacara adat). Dalam hal ini tepat Ter Haar mengatakan dalam bukunya (Hilman Hadikusuma, 1990:9), bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.

Perkawinan dalam arti ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut masyarakat adat Bali, ucapan perkawinan memiliki kata sinonim dengan “mesakapan”, yang berasal dari kata “sakap” yang mengandung arti “menyatu”, dalam hal ini diartikan sebagai menyatunya lingga dengan yoni, dengan sebutan “ardhanawari” sebagai kekuatan peleburan dosa. Upacara perkawinan sering juga disebut upacara “penganten” yang mengandung arti siap sebagai pengganti tanggungjawab orang tua (Putu Sudarsana, 2002: 3).

3. Menurut Hukum Agama

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah “akad (perikatan)” antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami. Jadi, perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan dengan calon suami, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja, sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (Hilman Hadikusuma, 1986: 11).

Menurut hukum Katholik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya

yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini, perkawinan bukan saja merupakan perikatan antara kedua suami isteri tetapi juga mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan (Hilman Hadikusuma, 1986: 12).

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti (G. Pudja, dalam Hilman Hadikusuma, 1990: 12).

Menurut hukum agama Budha, berdasarkan keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1, dikatakan “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan cinta kasih dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang diberkahi Sang Yang Adi Buddha”.

Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama, maka dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974, telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang bukan saja perikatan keperdataan tetapi juga perikatan keagamaan dan perikatan kekeluargaan.

TUJUAN PERKAWINAN

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan UUP secara eksplisit disebut dalam Pasal 1 yaitu “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bagaimana bentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu? Dapat dinyatakan berdasarkan ajaran yang dianut masyarakat Indonesia, yaitu ajaran agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Hal ini dapat dipahami melalui penjelasan Pasal 1 tersebut yang mengatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi kewajiban orang tua dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut UUP adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan ajaran agama, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtuaan).

2. Menurut Hukum Adat

Karena keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan bagi masyarakat adat berbeda-beda pula. Namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan (Patrilineal), keibuan (matrilineal) dan keibubapakan (Bilateral), untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, dalam memperoleh nilai-nilai adat dan kedamaian serta untuk mempertahankan kewarisan.

Pada masyarakat kekerabatan Patrilineal (Batak, Lampung, Bali dll), perkawinan

bertujuan mempertahankan garis keturunan Bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dan setelah terjadi perkawinan isteri masuk dalam kekerabatan suami dan lepas kedudukannya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Bila kekerabatan ini tidak membuahkan keturunan laki-laki (hanya perempuan saja), maka salah seorang anak perempuannya dinobatkan sebagai anak laki-laki sehingga berstatus hukum laki-laki. Keadaan ini dimasyarakat adat Bali disebut “anak sentana” dan perkawinannya berlangsung sebagai layaknya anak laki-laki yang suaminya keluar dari kekerabatan orang tuanya.

Pada masyarakat matrilineal (masyarakat Minangkabau), perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan Ibu, sehingga anak wanita tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dan setelah perkawinan dilaksanakan, suami masuk kedalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dari kekerabatan orang tuanya.

Pada masyarakat kekerabatan Bilateral tujuan perkawinan mempertahankan dan meneruskan keturunan garis Bapak dan Ibu seperti berlaku dikalangan orang-orang Jawa. Apabila keluarga yang dibentuk melalui perkawinan tidak memiliki keturunan maka upaya meneruskan keturunan itu dilakukan dengan mengangkat anak.

3. Menurut Hukum Agama

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur (Hilman Hadikusumah, 1990:24). Dalam hal untuk mendapat keturunan yang sah, Nabi Muhammad SAW., menyatakan “kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan)”. Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilangsungkan secara sah. Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat atau terjadinya perzinahan/pelacuran sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda “Hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin” (Hilman Hadikusumah, 1990:24).

Menurut Hukum Agama Kristen, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Menurut hukum agama Katholik untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami isteri dan obat nafsu (Hilman Hadikusumah, 1990:25).

Menurut ajaran Agama Hindu, manusia mengalami Catur Asrama atau empat tingkatan hidup manusia, yaitu Brahmachari (tingkatan saat mencari ilmu pengetahuan), Grahasta (tingkatan saat membina rumah tangga), Wanaprasta (tingkatan saat mempersiapkan meningkatkan kerohanian), Bhiksuka (tingkatan melepaskan dari ikatan duniawi).

Dalam pelaksanaan tingkatan Grahasta itulah bagi umat Hindu perkawinan itu dilaksanakan. Jadi, perkawinan disini merupakan tujuan membentuk keluarga (Grahasta Asrama) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut adalah “Yadnya” (bagi umat Islam disebut “Ibadah”), karena mengandung pengertian sebagai jalan untuk bisa membayar hutang (Rna) kepadanya para leluhur melalui jalan melahirkan anak yang suputra. Itulah sebabnya perkawinan bagi umat Hindu merupakan kawin suci yang

bersifat religius sehingga ritualnya disebut “samskara Wiwaha” (Putu Sudarsana, 2002:3).

Menurut Hukum Agama Budha tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi SangYang Adhi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Budhisatwa Mahasatwa.

SAHNYA PERKAWINAN

Memahami sahnya perkawinan ukurannya adalah perkawinan itu didasarkan atas norma atau kaidah tertentu. Bila kita mengatakan suatu perkawinan itu sah atas dasar norma atau kaidah Negara, ini berarti perkawinan itu telah dilaksanakan menurut tertib kaidah hukum Negara, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975. Begitu pula bila suatu perkawinan itu dikatakan sah atas dasar kaidah adat atau agama, maka perkawinan tersebut haruslah dilaksanakan menurut kaidah hukum adat atau kaidah hukum agama.

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dasar hukum keabsahan suatu perkawinan menurut UUP disebut dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Jadi, ukuran keabsahan suatu perkawinan menurut undang-undang adalah apabila dilaksanakan menurut tata tertib agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha.

Karena kata pernyataan “*menurut hukum masing-masing agamanya*” ini berarti menurut hukum salah satu agama itu masing-masing. Pemahaman seperti ini menimbulkan akibat suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan antar agama. Misalnya laki-laki beragama Islam, kawin dengan wanita yang juga beragama Islam, dan tidaklah dapat dibenarkan laki-laki beragama Islam kawin dengan wanita beragama Kristen, dsbnya.

Pernyataan *menurut hukum masing-masing agamanya*, seperti disebutkan di atas kerap kali disamakan dengan pemahaman *menurut hukum agamanya masing-masing*. Pemahaman yang belakangan ini adalah keliru, karena pemahaman ini menimbulkan akibat suatu perkawinan dapat diloaksanakan oleh calon suami isteri yang berlainan agama. Misalnya Laki-laki beragama Islam kawin dengan wanita beragama Kristen dan atau Hindu/Buddha Perkawinan seperti ini bukan perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 (1) UUP.

Kecuali ketentuan Pasal 2 (1) UUP di atas, suatu perkawinan haruslah dilakukan pencatatan sebagaimana ditegaskan pada ayat 2 pasal tersebut yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pencatat adanya suatu perkawinan ini menurut UUP merupakan langkah terakhir dari proses sebelumnya yang dilakukan menurut agama dan sebelumnya adalah pengumuman selama 10 hari. Pencatatan perkawinan untuk mereka yang beragama islam di Kantor KUA setempat, sedangkan selain Islam di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan adanya perkawinan menurut peraturan sebelum UUP, diatur dalam KUHPerd dan dilakukan sebelum dilaksanakan secara agama (Kristani) sebagaimana dikatakan pada Pasal 81 yang berbunyi : “Tiada suatu upacara keagamaan boleh

dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”.

Bahkan dalam Pasal 530 KUHP menyatakan : “Seorang petugas agama, yang melakukan upacara agama, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat burgerlijke stand, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelaksanaan dimuka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

2. Menurut Hukum Adat

Bagi masyarakat hukum adat yang menganut agama pada umumnya berkeyakinan bahwa, apabila suatu perkawinan sudah sah dilaksanakan menurut hukum agama, maka sudah sah juga menurut hukum adat. Kecuali bagi masyarakat hukum adat yang belum menganut hukum agama yang diakui oleh pemerintah seperti “sipelebegu” (pemuja roh) dikalangan orang Batak, atau agama Kaharingan dikalangan orang Dayak Kalimantan Tengah, dan lain-lain, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat / agama mereka itu adalah sah (Hilman Hadikusuma, 1990 : 27).

Ada kalanya masyarakat hukum adat tertentu beranggapan bahwa sahnya suatu perkawinan, belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Seperti pada masyarakat Lampung beradat Pepadun. Walaupun perkawinan suami isteri itu sudah sah dilaksanakan menurut hukum Islam, apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung, mereka belum diakui sebagai warga kekrabatan adat. Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat (Hilman Hadikusuma, 1990:28).

3. Menurut Hukum Agama

Menurut agama Islam yang berlaku di Indonesia pada umumnya dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di Mesjid atau di kantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon isteri dan kabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan tersebut harus terdengar dihadapan majelis dan dua orang saksi nikah. Jadi, sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut hukum Kristen/Khatolik, perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan dipenuhi, dan perkawinan dilaksanakan dihadapan pastur, yang dihadiri dua orang saksi. Sahnya perkawinan itu pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Untuk dapat disahkan perkawinan itu, kedua mempelai harus sudah dibaptis, ada kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak ada kekeliruan tentang orangnya, telah berumur 16 tahun bagi pria, 14 tahun bagi wanita, salah satu atau keduanya tidak terikat perkawinan lain.

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta. Bila ada yang salah satunya bukan beragama Hindu, maka sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara “Sudhiwadani” yang mengandung pengertian mengubah tatanan, baik dari sudut perilaku, ucapan dan pikiran tentang keyakinan serta kepercayaan terhadap Tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan agama Hindu (Putu Sudarsana, 2002:16).

Syarat lainnya adalah salah satu mempelai tidak terikat dengan perkawinan lain,

tidak berpenyakit jiwa, laki berumur 18 tahun dan wanita 15 tahun serta keduanya tidak ada hubungan darah (G. Pudja, dalam Hilman Hadikusuma 1990:32).

Terjemahan sloka yang memuat tentang sahnya perkawinan menurut ajaran agama Hindu, yang diucapkan mempelai pria : *"Aku ambil tanganmu demi nasib baik sehingga engkau mendapat umur panjang denganku sebagai suamimu, para dewa bhaga, aryaman, savita, purandhi, telah meberikanmu padaku, agar aku bisa menjadi kepala rumah tangga. Semoga semua dewa dan dewa air kehidupan mempersatukan hati kami, semoga matasisva, dhata dan destri semuanya menyatukan kami"*. Diucapkan oleh mempelai wanita : *"Semoga suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup seratus tahun"* (Reg veda X.85.47, dalam Titib,1996:8).

PERKAWINAN CAMPURAN

Pada umumnya yang terjadi, bila seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing memeluk agama berlainan ingin melangsungkan perkawinan, maka biasanya salah seorang dari mereka mengalah dan beralih kepada agama salah satu pihak. Bila demikian maka tentu tidak ada kesulitan dalam melaksanakan perkawinannya. Dalam praktek kerap kali terjadi perbedaan yang demikian, masing-masing pihak tetap teguh memeluk agamanya masing-masing, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melaksanakan kemauannya untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam keadaan yang disebutkan belakangan itu di Indonesia tempo dulu ada peraturan yang memberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan tersebut, yaitu dilaksanakan melalui peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken yang lazim disingkat GHR) yang dimuat dalam S.1898 Nomor 158. Pasal 1 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa *"Perkawinan di Indonesia antara dua orang yang masing-masing takluk pada hukum yang berlainan satu sama lain, dinamakan perkawinan campuran"*. Ayat 2 dari pasal tersebut menjelaskan bahwa *"Perbedaan agama, kebangsaan atau asal usul tidak merupakan penghalang bagi suatu perkawinan"*. Dalam melaksanakan kehidupan bagi suami isteri yang kawin atas perbedaan agama atau kebangsaan tersebut ditetapkan sama hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 GHR itu yaitu *" Dalam suatu perkawinan campuran itu si isteri prihal hukum perdata dan hukum publik, selama perkawinan berlangsung, turut pada hukum yang berlaku bagi suami"*.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, solusi yang diberikan oleh peraturan tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Di dalam undang-undang yang disebutkan belakangan ini solusi yang diberikan hanyalah bagian kecil dari perbedaan calon suami isteri yaitu bila berbeda kebangsaan saja atau kewarganegaraan saja. Hal ini diatur dalam Pasal 57 UUP yang berbunyi *"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia"*. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau

isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 58 UUP).

Jadi, jalan keluar yang diberikan atas perbedaan agama bagi calon suami isteri itu berdasarkan Pasal 57 UUP tidak ada, karena ketentuan pasal ini hanya mengatasi perbedaan kewarganegaraan saja. Hal ini dapat dimengerti karena keabsahan dari suatu perkawinan (termasuk perkawinan campuran) akan ditentukan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UUP tersebut yang menyatakan ” *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Bahasan pemahaman pasal itu telah penulis sampaikan di muka.

Namun demikian, kelihatannya ketentuan Pasal 56 (1) UUP dapat mengatasi kesulitan warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan beda agama. Bunyi Pasal tersebut adalah “*Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini*”.

Dengan menekankan unsur syarat “**menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan**”, dapat diketahui bahwa ada dua kemungkinan, yaitu *pertama*: bila negara tempat dilangsungkan perkawinan itu membenarkan perkawinan beda agama, itu berarti WNI tadi bisa melangsungkan perkawinan beda agama di sana, *kedua*: bila sebaliknya sama peraturannya dengan Indonesia, yakni melarang adanya perkawinan beda agama, maka WNI tadi tidak bisa menyelenggarakan perkawinan beda agama di negara itu. Umumnya negara yang membolehkan perkawinan beda agama itu adalah negara yang telah maju dan berlokasi jauh. Karena itu bila juga dilakukan di negara tersebut, kesulitan kedua bagi WNI tadi ada pada biaya untuk pergi kesana, apalagi bersama sanak keluarga, mengingat perkawinan adalah juga urusan keluarga atau kerabat (lihat uraian sebelumnya).

Bila memperhatikan unsur syarat (bagi WNI) ditetapkan bahwa “**bagi warganegara Indonesia tidak melanggar undang-undang ini**”. Undang-undang ini maksudnya UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Ketentuan pasal ini telah penulis bahas di muka, yang secara singkat bahasanya dikatakan secara kontradiktif melarang perkawinan beda agama. Karena itu unsur syarat ini akan menjadi penghalang perkawinan WNI beda agama yang diselenggarakan di luar Indonesia. Dalam praktek unsur syarat yang belakangan ini sering diabaikan, seperti yang pernah dilakukan oleh selebritis Yuni Shara dengan pengusaha Hendrik Siahaan di luar Indonesia (Australia), kini yang bersangkutan telah bercerai).

Mengingat keabsahan suatu perkawinan berdasarkan UUP Pasal 2 ayat 1 haruslah dicatat (termasuk perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan diluar negeri), maka ayat 2 Pasal 56 menyatakan bahwa “*Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka*”. Mengenai pencatatan inipun , terdapat masalah bila kita telaah, yaitu yang dicatat tentunya perkawinan yang sah. Menjadi keliru bila Pegawai Pencatat Perkawinan mencatat atau mendaftarkan perkawinan yang tidak sah. Dengan uraian belakangan ini bila perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia

bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 UUP, berarti tidak sah (seperti diuraikan di atas), maka jika begitu keadaannya pendaftarannya kelak di Indonesia harusnya ditolak, sehingga tidak dapat memegang surat bukti kawinnya.

Perkawinan campuran haruslah tegas dan mudah dilaksanakan serta dengan biaya ringan, seperti yang pernah berlaku di Indonesia dengan sebutan singaka GHR itu. Apabila tidak demikian maka sulit pertanggungjawabannya dari aspek hukum maupun HAM sebagaimana disinggung dalam Bab XA Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Termasuk dalam hal melalui perkawinan beda agama. Dengan ulasan kedua peraturan tersebut di atas diharapkan dapat diambil hikmahnya dalam pembentukan peraturan untuk waktu yang akan datang di bidang sinkronisasi pasal-pasal dan dapat dijadikan pertimbangan revisi peraturan yang tak mampu memberi solusi dari perbedaan.

PERKAWINAN SESAMA JENIS

Perkawinan sesama jenis telah mulai mengemuka, setelah kejadian itu terjadi di luar negeri dan rentetannya kemudian dengan akan dilakukannya rencana kongres kaum Gay di Surabaya yang dihadiri dari anggota organisasi Gay dari negeri luar (Eropah).

Dimuka telah disinggung bahwa ketertarikan dua orang manusia yang berlainan jenis, tidak hanya bertujuan bersetubuh, tetapi juga ingin membentuk keluarga (rumah tangga). Harus diakui faktor bersetubuh atau berhubungan seksual merupakan faktor pendorong yang penting untuk berkeluarga. Juga harus diakui faktor hubungan seksual tidaklah merupakan syarat mutlak membentuk keluarga dengan perkawinan, buktinya manusia yang sudah lanjut usiapun (manula) menurut hukum tidak dilarang kawin.

Pernyataan tersebut di atas, terkesan bebas dan demokratis serta penuh penghargaan terhadap HAM untuk melangsungkan suatu perkawinan yang dilandasi atas hubungan seksual. Kini menjadi suatu kajian tersendiri bagi hubungan seksual yang dilakukan secara menyimpang atau tidak umum dilakukan oleh kebanyakan orang (yaitu hubungan kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan), melainkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dengan laki-laki, yang lazim disebut hubungan secara *sodomi*, pelakunya yang umum dikenal *homoseksual*. Begitu juga hubungan seksual yang menyimpang karena dilakukan oleh perempuan dengan perempuan, melalui *oralsek*, pelakunya lazim disebut *lisbian*.

Fenomena tersebut merupakan bagian dari konteks dinamika masyarakat oleh Ibnu Khaldun yang kemudian melahirkan teori konflik kelompok dan hukum sosial konflik masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial baik pada nilai dan strukturalnya baik secara revolusioner ataupun evolusioner. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa muncul dalam bermacam-macam bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, mengubah pandangan hidup. Dalam ilmu sosiologi, khususnya sosiologi konflik dilahirkan

oleh perubahan-perubahan sosial dan dinamika gerakan sosial dari masa klasik sampai masa kontemporer. Dengan demikian ilmu sosiologi menjadi bagian dari gerakan sosial itu sendiri, maka seorang sosiolog dalam sejarahnya adalah reformis (Kornblurn,2003).Ibnu Khaldun memperlihatkan bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial ('ashobiyah) berbasis pada identitas,golongan,etnis,maupun tribal.Kelompok sosial dalam struktur sosial manapun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik.Hal ini dipengaruhi oleh sifat asal manusia yang sama dengan hewan.Masalah perkawinan sesama jenis dalam sejarah islam, telah pernah terjadi di era kepemimpinan para nabi yaitu Nabi Nuh dan Nabi Luth, terbukti telah membawa malapetaka yang luar biasa baik berujud kutukan wabah penyakit dan lainnya.

Bagaimanakah jika antara orang-orang sesama jenis ini (antar homo dan antar lisbian), melakukan hubungan seksual dan berkeinginan mengabadikan hubungannya itu atas dasar cinta kasih sayangnya membentuk keluarga melalui perkawinan? Apakah hubungan mereka membentuk keluarga dengan melakukan perkawinan dapat dibenarkan dalam perespektif hukum, agama dan adat?

Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas (kecuali dari sudut kacamata HAM), tentu sudah dapat difahami oleh pembaca budiman, melalui uraian-uraian penulis dimuka. Dengan perkataa lain, secara akontrario maksud penulis menguraikan ulasan perkawinan dari perspektif hukum (UUP), agama dan adat, menjadikan pembaca budiman dengan sendirinya dapat menempatkan perspektifnya dari kacamata itu terhadap perkawinan sesama jenis di Indonesia. Namun demikian, dibawah ini akan ditekankan lagi bagian-bagian dimuka yang menyangkut perspektif perkawinan sesama jenis di Indonesia.

Jawaban singkat dari ketiga lembaga di atas tentang perkawinan sesama jenis di Indonesia adalah tidak dibenarkan dan ditolerir sebagai suatu keinginan yang normal. Kalimat kunci tidak dibenarkannya perkawinan sesama jenis itu adalah karena perkawinan dari ketiga lembaga itu dipandang sebagai ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dan bertujuan untuk membuahkan keturunan dan menegakkan ajaran agama dan adat istiadat. Sebagai suami, maksudnya seorang laki-laki, sebagai isteri maksudnya seorang perempuan yang dapat melahirkan anak. Menegakkan agama dan adat istiadat maksudnya, pasangan suami isteri itu menghindari perbuatan zinah dan senantiasa menjalin silaturahmi kekerabatan.

Bagi pasangan yang sesama jenis, tentu hal yang demikian tidak dapat dipenuhi, karena itu bila perbuatannya itu dilakukan, jelas dipandang bukan sekedar sebagai perbuatan menyimpang, akan tetapi juga sebagai perbuatan yang berakibat dosa, bahkan dalam masyarakat adat sebagai perbuatan dosa dan aib. Bila perbuatan itu terjadi dipandang perlu dipulihkan dengan suatu upacara dan ritual tertentu. Dalam perespektif HAM, hubungan seksual yang menyimpang ini menurut hemat penulis tidaklah begitu rendah dan hinanya. Bila kita sadar dari sudut kacamata HAM, manusia sama dihadapan Tuhan dan Hukum. Tidak seorangpun menghendaki dilahirkan kedunia ini dengan keadaan yang menyimpang, dan juga tidak dibenarkan adanya suatu kaidah hukum apapun membedakan orang yang satu dengan yang lain.

Pandangan negara yang telah maju mempraktekan HAM hubungan seksual yang menyimpang tidaklah dianggap perbuatan dosa dan aib,. karena itu penyimpangan perilaku

seksual telah mendapat pengakuan dan pengaturannya, seperti yang dilakukan di negeri Belanda. Artinya keluarga dapat dibentuk melalui perkawinan oleh mereka yang sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan). Bagaimanakah hal itu di Indonesia untuk waktu yang akan datang? Menjawab pertanyaan ini tentu dimulai dari ketentuan UUDNRI Tahun 1945 Bab XA Pasal 28B (1) yang menyatakan *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Kaidah dasar negara yang memuat hak asasi ini menjadikan kita harus berpikir, berbuat dan berperilaku arif, bila diaplikasikan terhadap takdir Tuhan yang berperilaku seksual menyimpang. Jika kita hubungkan dengan Pasal 27 (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Melalui kedua kaidah dasar yang disebutkan itu, kita tentu tidak mungkin mengabaikan keinginan warganegara Indonesia yang ditakdirkan Tuhan berperilaku menyimpang (para homo dan lisbian) menuntut agar keinginan berpasangan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

Hendaknya difahami tidak tertutup jalan, bila secara kodrati mereka tidak bisa melakukan seperti “melahirkan anak”, bukankah juga dimaklumi dalam perjuangan hak asasi manusia dibidang jender, dimana perempuan juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki itu, dengan permakluman fisiknya secara kodrati tidak sekuat fisik laki-laki. Kenapa hal itu tidak bisa terjadi, bila perkawinan antar homoseksual atau antar lisbian, yang tidak bisa melahirkan anak, bukankah mereka bisa mengadopsi anak, sebagaimana pengadopsian yang dilakukan oleh pasangan normal sekalipun akan tetapi tidak mampu membuahkan keturunan.

Apabila di dalam masyarakat, hubungan seksual yang normal tidak boleh melakukan seksual bebas (hubungan sek tanpa kawin), sepatutnyalah para homo dan lisbian, jika diterima kodratnya seyogyanya juga demikian karenanya perlu diatur hubungan pembentukan keluarganya dengan peraturan perkawinan. Pernyataan seperti ini juga dapat dipayungi oleh ketentuan kaidah dasar negara yang diatur dalam Pasal 28I (5) yang berbunyi *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*.

Ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dalam UUDNRI Tahun 1945 yang berkorelasi dengan pengaturan hubungan seksual yang menyimpang untuk waktu-waktu yang akan datang haruslah diupayakan menerima bagi kalangan agama dan masyarakat adat, baru kemudian negara memberikan legalitasnya dan bentuk hukum.

Apabila hubungan seksual menyimpang (sesama jenis) terbukti dan teruji mengakibatkan potensial menimbulkan penyakit (H.I.P/AID) dan menular, tentu saja soal HAM bagi pelakunya tidak patut mendapatkan pelayanan hukum keabsahan bagi hubungan mereka dalam peraturan perkawinan. Pelaksanaan HAM dalam hal itu cukup mengupayakan, bagaimana penyakit yang diderita itu bisa diobati atau setidaknya diringankan deritanya dan tidak menular. Hal ini disadari bahwa bila membentuk pengukuhan hukum atas hubungan mereka, berarti menumbuhkan subur suatu penyakit yang konon tidak ada obatnya akan berakhir kepada kesulitan negara untuk mengatasinya. Bila tidak berakibat demikian, ulasan tentang perilaku sek yang menyimpang (homo dan lisbian) patut menjadi kajian tersendiri dalam korelasinya dengan HAM, mengingat siapapun di

dunia ini tidak ingin diciptakan sebagai makhluk yang berperilaku menyimpang.

III KESIMPULAN

Kesepakatan untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk itu disebut “keluarga atau rumah tangga”. Walaupun keberadaan keluarga dalam hal itu didasarkan atas kesepakatan, akan tetapi isi kesepakatan mereka tidak sama dengan isi kesepakatan pada umumnya, yaitu atas dasar asas kebebasan bersepakat, melainkan ditetapkan oleh suatu aturan, yang disebut “perkawinan”.

Dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat telah terjadi berbagai perubahan seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat dan komunikasi yang terjadi di masyarakat, mulai dari kawin paksa yang dikenal masyarakat adat. Disamping ada pelaksanaan perkawinan untuk menjaga kemurnian/kelestarian kekerabatan yang kuat.

Perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, sehingga ada perkawinan menurut hukum negara (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perkawinan menurut agama dan perkawinan menurut hukum adat. Ketiga stelsel hukum perkawinan itu menetapkan bahwa suatu perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan meneruskan keturunan serta bertujuan menegakkan ajaran agama dan menjalankan adat istiadat.

Peraturan perkawinan campuran di Indonesia sebelum UUP lebih baik dan mudah dilaksanakan (GHR S. 1898 – 158), karena dimungkinkan berbagai perbedaan dicampur dalam keluarga melalui perkawinan yang sah. Sejak tahun 1974 di Indonesia peraturan perkawinan campuran didasarkan atas ketentuan Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan percampuran hanya dapat dilakukan karena perbedaan kewarganegaraan. Bila yang dicampur dalam keluarga itu berbeda agama, mereka harus melangsung perkawinannya ke luar Indonesia, dengan syarat negara yang bersangkutan membenarkan adanya kawin beda agama dan bagi WNI tidak boleh melanggar syarat perkawinan di Indonesia. Syarat pertama mengakibatkan perkawinan membutuhkan biaya tinggi (karena harus ke luar Indonesia), sedangkan syarat kedua yaitu tidak melanggar syarat kawin di Indonesia. Sedangkan di Indonesia tidak boleh kawin beda agama. Syarat kedua inilah menimbulkan keraguan akan sahnya suatu perkawinan. Selain itu, jika berpegang kepada sahnya suatu perkawinan didasarkan atas adanya pencatatan, juga tidak menghapus keraguan itu, karena sebagai pejabat negara, tentu tidak akan mencatat perkawinan yang melanggar syarat perkawinan menurut undang-undang. Berdasarkan itu menurut kesan penulis, ketentuan perkawinan campuran yang diadopsi oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat *munafik*. Karena satu sisi boleh (asal dilakukan di luar Indonesia, sisi lain dengan syarat tidak boleh melanggar syarat perkawinan di Indonesia).

Perkawinan sesama jenis di Indonesia, dari kacamata agama dan adat, belum mendapat perspektif layak untuk dilakukan, bahkan dapat disebut dari kacamata agama sebagai suatu perbuatan dosa dan dari kacamata adat merupakan perbuatan dosa dan aib. Di luar Indonesia, di negara-negara yang telah lama menjunjung tinggi HAM, persamaan gender, ada yang sudah berani mengakui perkawinan sesama jenis. Untuk waktu yang akan datang di Indonesia melalui ketentuan Pasal 27 (1), yis Pasal 28B (1), 28D (1) & 28I (5), harus sudah mulai dipikirkan bagi warga negara yang secara kodrati ditakdirkan sebagai

mahluk berperilaku seksual menyimpang (homo dan lisbian) dapat membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan sepanjang hubungan mereka tidak berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar pertimbangan hakiki bagi penulis adalah “*tidak ada seorangpun manusia mau dan ingin ditakdirkan sebagai mahluk yang berperilaku menyimpang*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Cet. 1*, Bandung: Manda Maju, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. Kesembilan*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga. Cet. V*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hakim, S.A. *Hukum Islam (Perkawinan – Pewarisan – Wakaf)*. Jakarta, 1968.
- Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Cet. I*. Jakarta: Intermassa, 1990.
- Bimas Hindu dan Buda Depag RI. *Upadeca, Tentang Ajaran Agama Hindu*. Yayasan Dharma Sarathi, 1989.
- Sudarsana, I.B. Putu. *Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Perkawinan Hindu. Cet.* Yayasan Dharma Acarya, 2008.
- Novri Susan, MA. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Cet. I*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Sutan Takdir Alisyahbana, *Antropologi Budaya*. Balai Pustaka, 1984

---oo0oo---

Abstract: Mixed marriages in Indonesia were initially regulated through GHR S. 1898-158, which enabled the mixed marriages of candidate husbands/wives who possessed certain differences. Thus regulation was withdrawn through the introduction of Law Number 1 of 1974 regarding Marriages. Regarding mixed marriages, in accordance with Article 57, allowed mixed marriages were those with candidate husbands / wives who possessed different nationalities, and of which the marriages were performed in Indonesia. Should the difference of the candidate husband or wife lie in their respective religion, than that marriage would still be possible to be established outside Indonesia provided it is allowed in that particular country and as long as the Indonesian citizen taking part in that marriage does not transgress any marriage laws of Indonesia. A marriage between persons of different denominations is allowed in Indo. If the registering of a marriage would be regarded as the finalization of the legal validity of a marriage, than a marriage of persons of different denominations / religion performed outside Indonesia should actually not be allowed for registration in Indonesia. The marriage of persons of the same gender (such as between homosexuals and lesbians) in Indonesia, not only being not yet popular, even the existence of such a relation is regarded as being sinful and degrading. The prediction into the future, in Indonesia, based on the legal norms of the Indonesian Constitution – UUDNRI of 1945 Article 27 (1) likewise Article 28B (1) & 28I (5), should be taken into consideration for establishing a sexual relationship with the purpose of creating a family through marriage regulations, taking into account that no one whosoever in this world wants and likes to be destined as a human being possessing an deviation.